



**KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Taman Suropati Nomor 2, Jakarta 10310
Telepon (+6221) 31936207, 3905650; Faksimile (+6221) 3145374
www.bappenas.go.id

Nomor : B-13253/P.01/DL.03.02/07/2023 Jakarta, 14 Juli 2023
Sifat : Segera
Lampiran : 5 (lima) berkas
Hal : Pemanggilan Calon Peserta Pelatihan
Fungsional Perencana Ahli Pertama Tahun 2023

Yth.

1. Kepala Biro Kepegawaian/Sumber Daya Manusia Kementerian/Lembaga
2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota

Menindaklanjuti surat kami Nomor B-06347/P.01/DL.03.01/03/2023 tanggal 12 April 2023 perihal Penawaran Program Pelatihan Fungsional Perencana Ahli Pertama, bersama ini disampaikan bahwa Staf Saudara, sebagaimana daftar terlampir, telah memenuhi persyaratan untuk mengikuti pelatihan Fungsional Perencana Ahli Pertama Tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pelatihan Fungsional Perencana Ahli Pertama akan dilaksanakan secara daring pada 24 Juli 2023 hingga 8 September 2023 oleh Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia.
2. Selama pelaksanaan Program Pelatihan Beasiswa Pusbindiklatren Bappenas tersebut, peserta diwajibkan untuk selalu menyalakan video selama proses pelatihan berlangsung dengan tingkat kehadiran minimal 90 persen. Satu sesi = 2 jam pelajaran (jampel), dengan masing-masing jampel berdurasi 45 menit
3. Pemberian sertifikat kelulusan kepada peserta harus memenuhi kriteria sebagai berikut: a). Memenuhi tingkat kehadiran sebagaimana disebutkan pada poin 2; b). Memenuhi nilai minimum evaluasi pembelajaran (kuis, *post-test*, presentasi, penugasan lainnya baik secara individu maupun berkelompok), serta telah mengisi seluruh kuesioner dari Pusbindiklatren dan penyelenggara pelatihan; dan c). Mengikuti seluruh program pelatihan dengan baik dan dinyatakan memenuhi minimum kehadiran yang ditentukan. Dalam hal peserta gagal memenuhi persyaratan dalam poin a dan b, maka kepada yang bersangkutan hanya diberikan sertifikat keikutsertaan dalam pelatihan
4. Pembiayaan Program Pelatihan Fungsional Perencana Ahli Pertama Beasiswa Pusbindiklatren Bappenas Tahun 2023 melalui mekanisme *cost sharing*. Pusbindiklatren menanggung *tuition fee*, tunjangan paket data dan komunikasi, biaya bahan, biaya sewa ruang meeting virtual serta biaya pengawas sesuai dengan ketentuan pelaksanaan pelatihan Pusbindiklatren Bappenas. Sedangkan Instansi asal peserta menanggung biaya lain yang tidak ditanggung oleh Pusbindiklatren untuk menunjang pelaksanaan pelatihan.

5. Seluruh...

5. Seluruh calon peserta diwajibkan untuk mengunggah Surat Tugas dan Surat Pernyataan Kesediaan (format terlampir), **selambat-lambatnya pada tanggal 17 Juli 2023** melalui <http://sipena.bappenas.go.id>. Informasi panduan penggunaan aplikasi SIPENA dapat diakses melalui tautan <https://link.bappenas.go.id/panduan-sipena>.
6. Berkaitan dengan hal tersebut, mohon Saudara dapat menyampaikan informasi dan menerbitkan Surat Tugas untuk yang bersangkutan. Informasi lebih lanjut perihal pelaksanaan pelatihan secara bauran, dapat menghubungi Sdr. Naila Sukma Aisya melalui email pusbindiklatren@bappenas.go.id atau Sdr. Ira (CP LPEM UI) di nomor 08551261453

Atas perhatian dan kerja samanya, diucapkan terima kasih.

Kepala Pusat Pembinaan,
Pendidikan dan Pelatihan Perencana



Wignyo Adiyoso

Tembusan:

1. Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas
2. Kepala Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia
3. PPK Program PPN X, Kementerian PPN/Bappenas

Lampiran 1 : Daftar Tujuan
Nomor : B-13253/P.01/DL.03.02/07/2023
Tanggal : 14 Juli 2023

DAFTAR TUJUAN

1. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme;
2. Badan Pengawas Tenaga Nuklir;
3. Kementerian Agama;
4. Kementerian Dalam Negeri;
5. Kementerian Kelautan dan Perikanan;
6. Kementerian Kesehatan;
7. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
8. Kementerian Perdagangan;
9. Kementerian Perhubungan;
10. Kementerian Sosial;
11. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
12. Pemerintah Kabupaten Bogor;
13. Pemerintah Kabupaten Lahat;
14. Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu;
15. Pemerintah Kabupaten Tanah Datar;
16. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Lampiran 2 : Hak dan Kewajiban Peserta
Nomor : B-13253/P.01/DL.03.02/07/2023
Tanggal : 14 Juli 2023

HAK DAN KEWAJIBAN PESERTA

Kewajiban dan tugas dari peserta pelatihan adalah sebagai berikut:

- a. menyediakan dokumen pendukung pertanggungjawaban pengeluaran (jika dibutuhkan);
- b. menyiapkan alat pendukung untuk mengikuti pelaksanaan pelatihan;
- c. mengikuti seluruh rangkaian agenda pelaksanaan program pelatihan sesuai dengan ketentuan;
- d. mengikuti pelatihan dengan minimal tingkat kehadiran sesuai ketentuan, yakni minimal 90 persen dari jumlah jam pelajaran;
- e. dalam hal berhalangan atau perlu meninggalkan kegiatan pelatihan karena kepentingan pribadi yang mendesak, peserta wajib mendapatkan izin dari pelaksana pelatihan;
- f. menandatangani surat pernyataan bersedia mengganti semua biaya yang dikeluarkan oleh Pusbindiklatren apabila tidak mengikuti ketentuan yang berlaku selama pelatihan;
- g. mengisi kuesioner pelaksanaan pelatihan yang ditentukan oleh Pusbindiklatren;
- h. menyampaikan/mengunggah surat tugas dan surat kesediaan mengikuti pelatihan (Lampiran 4);

Adapun hak dari peserta pelatihan adalah sebagai berikut:

- a. mendapatkan pelatihan sesuai kurikulum;
- b. mendapatkan bahan pelatihan;
- c. mendapatkan akun dan akses ke dalam Sipena;
- d. mendapat dokumen kelulusan/penyelesaian pelatihan sesuai dengan ketentuan tiap-tiap pelatihan

Lampiran 3 : Hak dan Kewajiban Instansi
Nomor : B-13253/P.01/DL.03.02/07/2023
Tanggal : 14 Juli 2023

HAK DAN KEWAJIBAN INSTANSI PESERTA PELATIHAN

Kewajiban dan tugas dari instansi pengirim peserta pelatihan adalah sebagai berikut:

- a. memberikan dukungan kelengkapan dokumen administrasi pelatihan yang disyaratkan Pusbindiklatren dan atau pelaksana pelatihan; serta
- b. memberikan dukungan pembiayaan (*co-funding*) sesuai dengan kebutuhan dengan merujuk kepada Surat Edaran (SE) Menteri PPN/ Kepala Bappenas Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pembiayaan Bersama (*cost sharing*) Dalam Penyelenggaraan Program Beasiswa Kementerian PPN/Bappenas.

Adapun hak dari instansi pengirim peserta pelatihan adalah sebagai berikut

- a. mendapatkan peserta yang telah memiliki kompetensi di bidang perencanaan sesuai dengan jenjangnya untuk Pelatihan Fungsional Perencana;
- b. mendapatkan informasi terkait pelaksanaan pelatihan dari Pusbindiklatren dan/atau pelaksana pelatihan.

Lampiran 4 : Surat Kesediaan Peserta
Nomor : B-13253/P.01/DL.03.02/07/2023
Tanggal : 14 Juli 2023

**SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN PESERTA PROGRAM PELATIHAN
TAHUN ANGGARAN 2023**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :.....
.
NIP :.....
.
Pangkat/Golongan :.....
.
Jabatan :.....
.
Alamat Kantor :.....
.
Telp :.....email resmi kantor
(**.go.id).....
No Handphone :.....email pribadi (***.com).....
Pelatihan :.....
.
Pelaksana Pelatihan :.....
.

Menyatakan bahwa:

1. Bersedia untuk mengikuti Beasiswa Program Pelatihan Pusbindiklatren Bappenas Tahun 2023. Apabila saya **mengundurkan diri setelah batas waktu** yang ditetapkan dalam surat pemanggilan, saya bersedia mengganti seluruh biaya yang dikeluarkan oleh Pusbindiklatren dalam pelaksanaan Beasiswa Program Pelatihan Pusbindiklatren Bappenas Tahun 2023.
2. Bersedia mengikuti seluruh proses pelatihan sesuai dengan ketentuan yang ditentukan Pusbindiklatren Bappenas dan Pelaksana Pelatihan, termasuk tidak melaksanakan pekerjaan rutin di kantor selama pelatihan berlangsung.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,
Pimpinan Instansi (Minimal Eselon II)

Yang Berjanji,

(Cap Basah stempel)

(Tanda tangan dan Meterai 10.000)

(.....)
NIP.

(.....)
NIP.

Lampiran 5 : Daftar Nama Peserta
Nomor : B-13253/P.01/DL.03.02/07/2023
Tanggal : 14 Juli 2023

DAFTAR PESERTA PELATIHAN FUNGSIONAL PERENCANA AHLI PERTAMA TAHUN 2023

NO	NAMA	NIP	INSTANSI	UNIT KERJA	KOTA/KAB	PROV
1	Aditya Dwifabri Christian Wibowo	199102222020121012	Kementerian Dalam Negeri	Dit.fasilitasi Kelembagaan Dan Kepegawaian	Kota Jakarta Pusat	DKI
2	Dania Dwi Febriani	199702162020122014	Pemerintah Kabupaten Bogor	BAPPEDALITBANG	Kabupaten Bogor	JABAR
3	Delpini Simanjong	198603082020122007	Pemerintah Provinsi Sumut	Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara	Kota Medan	SUMUT
4	Dian	198807212020121001	Kementerian Perhubungan	Badan Kebijakan Transportasi	Kota Jakarta Pusat	DKI
5	Dian Putri Maharani	198902022020122006	Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu	Bappelitbangda Kab.OKU	Kabupaten Ogan Komering Ulu	SUMSEL
6	Gholib Tamam Fauzi	199602202020121007	Kementerian Perhubungan	Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Udara	Kota Jakarta Pusat	DKI
7	Hotnatanael Marulitua Malau	198411282020121003	Kementerian Perhubungan	Direktorat Sarana Perkeretaapian	Kota Jakarta Pusat	DKI
8	Idris	199306032020121010	Pemerintah Kabupaten Tanah Datar	BAPPEDA DAN LITBANG	Kabupaten Tanah Datar	SUMBAR

 **Perhatian:** Dilarang Memberikan Sesuatu yang Dapat Mengakibatkan KKN



NO	NAMA	NIP	INSTANSI	UNIT KERJA	KOTA/KAB	PROV
9	Kartika Widya Hapsari	199009252020122015	Kementerian Perdagangan	Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri	Kota Jakarta Pusat	DKI
10	Maliki	199206202020121010	Kementerian Perdagangan	Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu	Kota Jakarta Timur	DKI
11	Maradhika	198810172020121001	Pemerintah Kabupaten Lahat	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kabupaten Lahat	SUMSEL
12	Mia Pramudiyanti	199305222020122019	Kementerian Dalam Negeri	Direktorat EKPKD	Kota Jakarta Pusat	DKI
13	Muhamad Saepulloh	199106032020121007	Kementerian Agama	Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam	Kota Jakarta Pusat	DKI
14	Muhammad Arizal	199510222020121003	Kementerian Perhubungan	Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Udara	Kota Jakarta Pusat	DKI
15	Muhammad Reza Ardy	199101042020121011	Kementerian Agama	Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam	Kota Jakarta Pusat	DKI
16	Novoda SI Sihombing	198911142020122011	Kementerian Dalam Negeri	Dit. Produk Hukum Daerah	Kota Jakarta Pusat	DKI
17	Oksendi Vitra Sihombing	199110212020122023	Badan Pengawas Tenaga Nuklir	BAPETEN / Biro Perencanaan, Informasi dan Keuangan	Kota Jakarta Pusat	DKI
18	Argita Indah Candradevy	198501022020122002	Kementerian Kesehatan	RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo	Kota Makassar	Sulses
19	Raihan Yusuf	199610252020121002	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme	Direktorat Penindakan	Kota Jakarta Pusat	DKI

NO	NAMA	NIP	INSTANSI	UNIT KERJA	KOTA/KAB	PROV
20	Fadhillah Hermawan	199211252020121006	Kementerian Kesehatan	RSUP Dr Sitanala Tangerang	Kota Tangerang	BANTEN
21	Rifka Adelia	199309022019022005	Kementerian Sosial	Biro Keuangan	Kota Jakarta Pusat	DKI
22	Sammy Lugina	199102112020121010	Pemerintah Kabupaten Bogor	Bappedalitbang	Kabupaten Bogor	JABAR
23	Syaiful Rusli Effendy Pane	199503082020121013	Kementerian Dalam Negeri	Direktorat PKD-EPD	Kota Jakarta Selatan	DKI
24	Vernanda Fairuz	199703142020122010	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Biro Perencanaan dan Keuangan	Kota Jakarta Pusat	DKI
25	Yusicka Warih Satyaningrum	198706272020122003	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Sekretariat BKIPM	Kota Jakarta Pusat	DKI